

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
PADA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2018**

***THE EFFECT OF CAPITAL EXPENDITURE, SPECIAL ALLOCATION
FUNDS, AND LOCAL GOVERNMENT REVENUE ON THE LEVEL OF
REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE OF DISTRICT AND CITY IN THE PROVINCE
OF WEST JAVA, 2015-2018***

Riska Afiatul Affifah¹, Sri Rahayu²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹riskaafiatalaffifah@student.telkomuniversity.ac.id,

²sriahayu@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Kemandirian keuangan daerah adalah pemerintah daerah mampu membiayai sendiri dalam melaksanakan pembiayaan kegiatan, pembangunan serta pelayanan daerah terhadap masyarakat dengan keuangan daerahnya sendiri tanpa ikut campur pemerintah pusat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dari 27 sampel kabupaten/kota dengan tahun pengamatan selama 4 tahun dari tahun 2015-2018 dengan total data observasi sebanyak 108 data. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan Eviews 10.

Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 96,79%, sedangkan sisanya sebesar 3,21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Sedangkan belanja modal dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian secara simultan, menunjukkan bahwa belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Abstract

Regional financial independence means that local governments are able to finance themselves in carrying out activity financing, development and regional services to the community with their own regional finances without interfering with the central government. This research was conducted with the aim of knowing the effect of capital expenditure, special allocation funds and local revenue on the level of regional financial independence either simultaneously or partially. The data used in this study were obtained from the District / City APBD Realization Report in West Java Province 2015-2018.

The population in this research is the Regency / City in West Java Province 2015-2018. This research uses quantitative methods. The sampling technique in this study used the census method from

27 samples of districts / cities with a 4-year observation year from 2015-2018 with a total of 108 observation data. The statistical analysis of the data used in this study is panel data regression analysis with Eviews 10.

The results obtained show that capital expenditure, special allocation funds and local revenue are able to explain the level of regional financial independence of 96.79%, while the remaining 3.21% is explained by other variables outside the study. The partial test results show that local revenue has a positive effect on the level of regional financial independence. Meanwhile, capital expenditure and special allocation funds have no effect on the level of regional financial independence. Simultaneous test results show that capital expenditures, special allocation funds and local revenue have an effect on the level of regional financial independence.

Keywords: Capital Expenditures, Special Allocation Funds, Regional Original Income, Level of Regional Financial Independence.

1. Pendahuluan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945^[1]. Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi^[1].

Menurut data DJPK Republik Indonesia Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat untuk periode 2015-2018 berada pada pola hubungan delegatif atau bisa diartikan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat dianggap sudah benar benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Tetapi masih sedikit Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang sudah dinyatakan kategori kemandiriannya tinggi dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota yang dinyatakan kategori kemandiriannya rendah atau bahkan sangat rendah.

Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) salah satunya adalah Belanja Modal yang dimiliki suatu daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD)^[2]. Tetapi pada penelitian lain menunjukkan dimana belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah^[3]. Adapun penelitian lain yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Selain dari belanja modal, variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD) adalah bisa dilihat dari tingkat dana alokasi khusus (DAK) yang dimiliki oleh suatu daerah. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN^[4]. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah^[5]. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang menghasilkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah^[6].

Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat juga dari besar atau kecilnya pendapatan asli daerah tersebut dibandingkan tingkat pendapatan daerah dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lainlain pendapatan asli daerah yang sah^[1]. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD)

meningkat maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) juga meningkat, sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) juga rendah ^[6]. Tingkat pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah atau yang selanjutnya disebut TKKD ^[6]. Tetapi terdapat pendapat lain dari peneliti yang juga melakukan penelitian sejenis, menemukan bahwa pendapatan asli daerah yang diukur dengan efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh signifikan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah ^[7].

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat periode 2015-2018 serta untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dalam mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat periode 2015-2018 secara parsial dan simultan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dari 27 sampel kabupaten/kota dengan tahun pengamatan selama 4 tahun dari tahun 2015-2018 dengan total sebanyak 108 data. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan *random effect model*.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1.1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Angka rasio yang semakin tinggi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah semakin tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya ^[8]. Adapun rumus untuk mengetahui Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) adalah ^[8]:

$$TKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1
Pola Hubungan dan Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
0% – 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim, 2014:228

2.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal didefinisikan sebagai semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya ^[9]. Besarnya jumlah variabel belanja modal dapat dilihat dari laporan realisasi APBD kabupaten/kota pada tahun anggaran yang diteliti. Belanja Modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Belanja Modal

$$\begin{aligned} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesein} \\ &+ \text{Belanja Modal dan Bangunan} \\ &+ \text{Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan} \\ &+ \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

2.1.3. Dana Alokasi Khusus

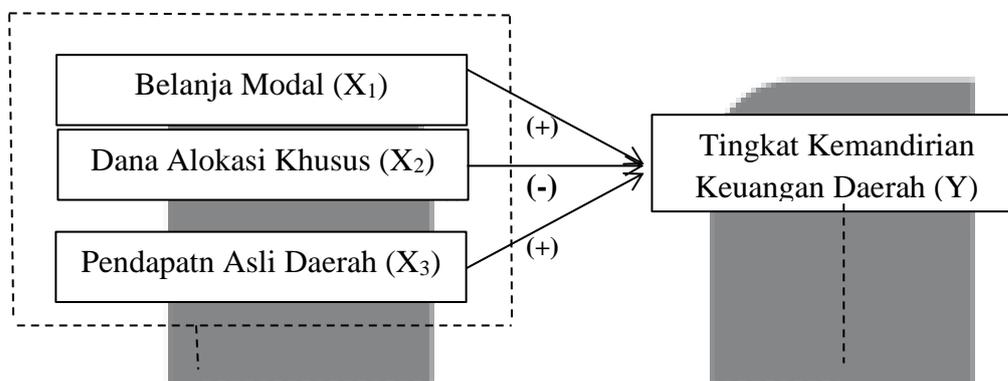
Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. DAK dapat diukur menggunakan rasio dengan melihat besarnya antara realisasi DAK dibandingkan dengan total pendapatan daerah dalam laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota, seperti pada rumus:

$$\text{Dana Alokasi Khusus} = \frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan atau penerimaan daerah yang diperoleh dengan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan^[4]. Pada penelitian ini PAD diukur menggunakan rasio dengan melihat besarnya realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota, seperti pada rumus berikut:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- = Secara Parsial
- = Secara Simultan

Dari hasil kerangka pemikiran diatas, dapat disimpulkan hipotesis sementara dari penelitian ini, sebagai berikut:

- H1 : Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- H2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
- H4 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandiria Keuangan Daerah.

2.2. Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dari 27 sampel kabupaten/kota dengan tahun pengamatan selama 4 tahun dari tahun 2015-2018 dengan total data sebanyak 108 data. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan *random effect model* dengan melakukan beberapa tahap pengujian. Persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada daerah i tahun ke-t
- X1 = Belanja Modal
- X2 = Dana Alokasi Khusus
- X3 = Pendapatan Asli Daerah
- α = Konstanta
- $\beta_1-\beta_3$ = Koefisien regresi
- e = Error term

3. Pembahasan

3.1. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

3.1.1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.718821	(26,76)	0.0000
Cross-section Chi-square	114.902459	26	0.0000

Gambar 3. 1 Hasil Uji Chow

Berdasarkan hasil uji signifikansi *fixed effect* (uji Chow) maka diperoleh nilai probabilitas (*cross-section Chi-square*) sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05 (5%). Dengan data tersebut maka H0 ditolak atau penelitian lebih baik menggunakan model *fixed effect*. Pengujian selanjutnya dilakukan menggunakan uji Hausman dengan menguji antara model *random effect* atau *fixed effect*.

3.1.2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.923622	3	0.0744

Gambar 3. 2 Hasil Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji Hausman, maka diperoleh nilai probabilitas (*crosssection random*) sebesar 0,0744 atau lebih dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Dengan data tersebut maka H0 diterima atau penelitian lebih baik menggunakan model *random effect*.

3.1.3. Uji Lagrange Multiplier

Breusch-Pagan	35.68816 (0.0000)	1.484900 (0.2230)	37.17306 (0.0000)
Honda	5.973957 (0.0000)	-1.218565 (0.8885)	3.362570 (0.0004)
King-Wu	5.973957 (0.0000)	-1.218565 (0.8885)	0.766930 (0.2216)
GHM	-- --	-- --	35.68816 (0.0000)

Gambar 3. 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier, maka diperoleh nilai probabilitas (*Breusch-Pagan*) sebesar 0,0000 atau kurang dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Dengan data tersebut maka H_0 ditolak atau penelitian lebih baik menggunakan model *random effect*.

3.1.4. Persamaan Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.347724	0.180290	-1.928693	0.0565
X1	0.009316	0.006772	1.375679	0.1719
X2	-0.023263	0.043536	-0.534338	0.5943
X3	1.874404	0.034777	53.89805	0.0000

Gambar 3. 4 Hasil Pengujian Statistik Signifikansi *Random Effect*

Berdasarkan gambar yang menunjukkan hasil pengolahan model *random effect* maka dapat dibentuk persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$TKKDVit = -0,1171 + 6,64E-14BMit - 0,0571DAKit + 1,8207PAD$$

Keterangan:

- TKKD = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
 BM = Belanja Moda
 DAK = Dana Alokasi Khusus
 PAD = Pendapatan Asli Daerah

3.2. Pengujian Asumsi Klasik

3.2.1. Analisis Uji Multikolinieritas

Tabel 3.1 Hasil Uji Multikolinieritas

	BM	DAK	PAD
BM	1.000000	-0.180199	0.406912
DAK	-0.180199	1.000000	-0.416601
PAD	0.406912	-0.416601	1.000000

Dari hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 3.1 menunjukkan hasil analisis belanja moda (BM), dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD) berturut-turut adalah -0.180199, dan 0.406912. Bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh kurang dari 0,9 yang artinya tidak terdapat korelasi antar variabel independen satu dengan variabel independen yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pengujian tersebut tidak menunjukkan terjadinya multikolinieritas.

3.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.044085	0.079601	-0.553828	0.5809
X1	0.002159	0.002992	0.721699	0.4721
X2	0.000820	0.035761	0.022944	0.9817
X3	0.027113	0.015944	1.700487	0.0921
R-squared	0.054929	Mean dependent var		0.020044
Adjusted R-squared	0.027133	S.D. dependent var		0.015680
S.E. of regression	0.015465	Akaike info criterion		-5.463408
Sum squared resid	0.024396	Schwarz criterion		-5.362901
Log likelihood	293.5606	Hannan-Quinn criter.		-5.422672
F-statistic	1.976140	Durbin-Watson stat		1.807817

Prob(F-statistic) 0.122258

Gambar 3. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari setiap variabel adalah $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.3. Pengujian Hipotesis

3.3.1. Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.968843	Mean dependent var	0.126176
Adjusted R-squared	0.967927	S.D. dependent var	0.101032
S.E. of regression	0.017803	Sum squared resid	0.032329
F-statistic	1057.264	Durbin-Watson stat	2.082464
Prob(F-statistic)	0.000000		

Gambar 3. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil pengujian *random effect* model yang tersaji pada tabel 3.6 yang menunjukkan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.967927 atau 96.79%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari belanja modal, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0.967927 atau 96.79%, sedangkan sisanya sebesar 0.032100 atau 3,21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

3.3.2. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian *random effect* model pada tabel 3.6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Prob F-Statistic) yang diperoleh adalah sebesar 0,000000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi yaitu 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3.2.3. Uji Parsial (Uji t)

Vriable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.347724	0.180290	-1.928693	0.0565
X1	0.009316	0.006772	1.375679	0.1719
X2	-0.023263	0.043536	-0.534338	0.5943
X3	1.874404	0.034777	53.89805	0.0000

Gambar 3. 7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian *random effect* model pada tabel 3.7 hasil pengujian uji parsial (uji t) sebagai berikut:

1. Variabel belanja modal (BM) memiliki nilai koefisien sebesar 0.009316 dengan nilai probabilitas 0.1719 lebih dari $\alpha = 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H01 diterima yang artinya variabel belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota propinsi jawa barat tahun 2015-2018.
2. Variabel dana alokasi khusus (DAK) memiliki nilai koefisien sebesar -0.023263 dengan nilai probabilitas sebesar 0.5943 lebih dari $\alpha = 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H02 diterima yang artinya variabel dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota propinsi jawa barat tahun 2015-2018.
3. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai koefisien sebesar 1.874404 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 kurang dari $\alpha = 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak yang artinya variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota propinsi jawa barat tahun 2015-2018.

3.2.4. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, Belanja modal memiliki tingkat probabilitas $0.1719 > 0.05$ dengan nilai koefisien 0.009316 maka H_0 diterima yang dapat diartikan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap TKKD. Hasil tersebut tidak sesuai dengan kerangka pemikiran yang menyebutkan bahwa semakin besar belanja modal, maka TKKD akan semakin meningkat atau sebaliknya.

Hal ini berkaitan dengan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa belanja modal yang berada di atas rata-rata sebesar 53,7% dan belanja modal yang berada di bawah rata-rata sebesar 46,3%. Dari 53,7% data belanja modal yang berada di atas rata-rata, terdapat 23.1% data TKKD yang di atas rata-rata dan 30.6% data TKKD yang berada di bawah rata-rata. Sedangkan dari 46,3% data belanja modal yang berada di bawah rata-rata, terdapat 12.0% data TKKD yang berada di atas rata-rata dan 34,3% data TKKD yang berada di bawah rata-rata. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap TKKD ^[10].

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, dana alokasi khusus memiliki tingkat probabilitas $0.5943 > 0.05$ dengan nilai koefisien -0.023263 maka H_0 diterima yang dapat diartikan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap TKKD. Hasil tersebut tidak sesuai dengan kerangka pemikiran yang menyebutkan bahwa semakin besar dana alokasi khusus, maka TKKD akan semakin menurun atau sebaliknya.

Hal ini berkaitan dengan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus yang berada di atas rata-rata sebesar 52.8% dan dana alokasi khusus yang berada di bawah rata-rata sebesar 47.2. Dari 52,8% data dana alokasi khusus yang berada di atas rata-rata, terdapat 11.1% data TKKD yang di atas rata-rata dan 41.7% data TKKD yang berada di bawah rata-rata. Sedangkan dari 47,2% data dana alokasi khusus yang berada di bawah rata-rata, terdapat 24.1% data TKKD yang berada di atas rata-rata dan 23.1% data TKKD yang berada di bawah rata-rata. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap TKKD ^[6].

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, pendapatan asli daerah memiliki tingkat probabilitas $0.0000 < 0.05$ dengan nilai koefisien 1.874404 maka H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap TKKD. Hasil tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran yang menyebutkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah, maka TKKD akan semakin meningkat atau sebaliknya.

Hal ini berkaitan dengan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang berada di atas rata-rata sebesar 39.8% dan pendapatan asli daerah yang berada di bawah rata-rata sebesar 60.2%. Dari 39,8% data pendapatan asli daerah yang berada di atas rata-rata, terdapat 35.2% data TKKD yang di atas rata-rata dan 4.6% data TKKD yang berada di bawah rata-rata. Sedangkan dari 60,2% data pendapatan asli daerah yang berada di bawah rata-rata, terdapat 0.00% data TKKD yang berada di atas rata-rata dan 60.2% data TKKD yang berada di bawah rata-rata. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap TKKD ^[11].

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pengujian menggunakan model regresi data panel yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian analisis statistik deskriptif, telah diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Belanja modal dalam penelitian ini dilihat dari laporan realisasi APBD kabupaten/kota pada propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2015-2018. Hasil pengujian statistik deskriptif dari belanja modal memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 26,95. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki

- nilai belanja modal di bawah rata-rata sebesar 46,3%. Sedangkan yang memiliki nilai belanja modal di atas rata-rata sebesar 53,7%.
- b. Dana alokasi khusus dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio dengan melihat besarnya antara realisasi DAK dibandingkan dengan total pendapatan daerah dalam laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota. Hasil pengujian statistik deskriptif dari dana alokasi khusus memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,10. Jumlah dana alokasi khusus kabupaten/kota yang memiliki nilai dana alokasi khusus di bawah rata-rata sebesar 47,2%. Sedangkan yang memiliki nilai dana alokasi khusus di atas rata-rata sebesar 52,8%.
 - c. Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio dengan melihat besarnya realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota. Hasil pengujian statistik deskriptif dari pendapatan asli daerah memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,22. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki nilai pendapatan asli daerah di bawah rata-rata sebesar 60,2%. Sedangkan yang memiliki nilai pendapatan asli daerah di atas rata-rata sebesar 39,8%.
2. Berdasarkan pengujian uji simultan (uji F) variabel belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota propinsi jawa barat pada tahun 2015-2018.
 3. Berdasarkan pengujian uji parsial (uji t) diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota propinsi jawa barat pada tahun 2015-2018.
 - b. Dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota propinsi jawa barat pada tahun 2015-2018.
 - c. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan pada kabupaten/kota propinsi jawa barat pada tahun 2015-2018.

5.1. Saran

1.2.1. Aspek Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

- a. penelitian ini hanya fokus pada sub sektor pemerintah daerah kabupaten/kota, bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah diharapkan menambahkan sampel yang digunakan dan memperpanjang rentang waktu penelitian untuk melihat lebih jelas pengaruh dari variabel-variabel terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk diteliti kembali variabel yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu, belanja modal dan dana alokasi khusus. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan variabel berbeda yang terkait dengan tingkat kemandirian keuangan daerah seperti PDRB, DAU, Pertumbuhan ekonomi, DBH, dan lainnya.

1.2.2. Aspek Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Propinsi Jawa Barat
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sehingga tercapainya salah satu tujuan dari otonomi daerah.
- b. Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota pada Propinsi Jawa Barat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bermanfaat bagi masyarakat mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah agar masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam mengevaluasi dan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota pada Propinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [2] Ariani, K., & Putri, G. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper; 2460-0784*.
- [3] Ramadhani Darwis, Erstelita Tria 2015. "Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat", Artikel Ilmiah, Prodi Akuntansi FE UNP, Padang.
- [4] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- [5] Yulianto, Andri. 2018. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016)". Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [6] Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *E-Proceeding of Management: 3 (3)*, 2355-9357, 3308.
- [7] Oktavianti, Rika and Tjahjono, Achmad. 2016. "Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY". Skripsi thesis, STIE Widya Wiwaha.
- [8] Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [9] Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik (edisi revisi). Yogyakarta: UII Press.
- [10] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- [11] Handayani, T. U., & Erinosa, N. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348-2361.
- [12] Amalia, N., & Haryanto, H. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis), 8(2), 2337-3806
- [13] Basuki dan Prawoto. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [14] Sugiyono. (2018). Metode Analisis Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.